

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan ini merupakan aset fundamental bagi setiap individu dalam memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan, sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen negara mengangkat kecerdasan kehidupan bangsa (Putri & Ramadani, 2024). Pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat (Septiana et al., 2024). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terencana untuk mengembangkan potensi siswa melalui melalui proses pembelajaran yang mendorong pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Secara global, pendidikan berfungsi sebagai pilar penting dalam pembangunan manusia karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kestabilan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4, yaitu menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan setara bagi semua (UNESCO, 2020). Pemerintah Indonesia mendukung agenda tersebut melalui kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2008, yang menegaskan dedikasi negara untuk menyediakan akses pendidikan secara gratis bagi seluruh rakyat (Masing & Astuti, 2021) Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai strategi utama dalam memperkuat daya saing negara.

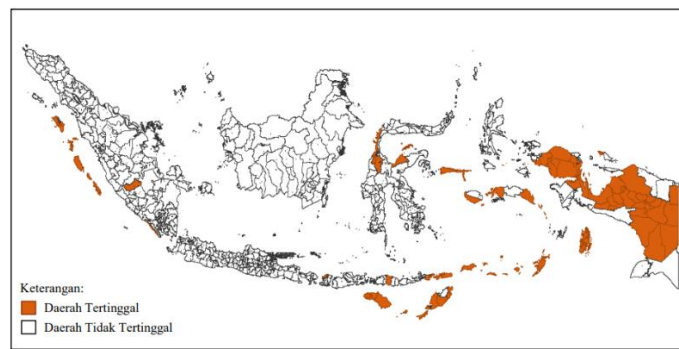
Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan ketimpangan akses dan capaian antarwilayah. Ketimpangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan pendidikan. Studi pembangunan menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan refleksi dari ketimpangan pembangunan wilayah yang bersifat struktural, khususnya di negara berkembang (Asadullah, M. Niaz; Savoia, 2018)(Tikly, Leon; Barrett, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis wilayah.

Wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merupakan kawasan yang paling rentan terhadap ketimpangan pendidikan. Faktor geografis kepulauan, keterbatasan akses transportasi, minimnya fasilitas sekolah, serta ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan pendidikan yang setara. Ketimpangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural karena berkaitan langsung dengan karakteristik kewilayahan dan kapasitas pembangunan daerah. Penelitian pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur masih mengalami kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan dibandingkan wilayah barat Indonesia (Suryadarma, Daniel; Jones, 2020).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan faktor penting yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur dasar, serta aksesibilitas yang rendah cenderung

menghadapi hambatan lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan. Studi pembangunan wilayah menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan sering kali merupakan refleksi langsung dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial antarwilayah (Asadullah, M. Niaz; Savoia, 2018)(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2020).

Gambar 1. 1 Peta Sebaran daerah tertinggal di indonesia (2020-2024)



Sumber : Perpres Nomor 63 Tahun 2020, diolah

Gambar 1.1 menunjukkan sebaran daerah tertinggal di Indonesia selama periode 2020–2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Peta tersebut memperlihatkan bahwa konsentrasi daerah tertinggal masih dominan berada di kawasan Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Pola sebaran ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang bersifat struktural, di mana daerah dengan kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan publik yang rendah cenderung tertinggal dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor pendidikan, terutama dalam hal pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, peta ini menegaskan relevansi pemilihan wilayah Indonesia Timur sebagai fokus penelitian

dalam mengkaji determinan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gambar 1. 2 Digram Batang Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 2024



Diagram pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Pola ini mengindikasikan bahwa pendidikan dasar relatif lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, sementara keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi masih menghadapi berbagai hambatan. Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketimpangan akses pendidikan yang bersifat struktural, di mana kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sekolah, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi dan keterjangkauan layanan pendidikan (McCowan, 2018)(Ardianti, Yulia; Rahman, Abdul; Putri, 2024).

Penurunan partisipasi yang semakin tajam pada jenjang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan lanjutan masih menjadi tantangan besar di negara berkembang. Studi internasional menegaskan bahwa ketidaksetaraan akses pendidikan tinggi dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang

relatif tinggi, ketimpangan kualitas antar lembaga pendidikan, serta distribusi institusi pendidikan tinggi yang tidak merata secara geografis Education, Knowledge Capital, and Economic Growth (Asadullah, M. Niaz; Savoia, 2018). Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil penduduk yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma dan sarjana, sehingga memperlebar kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok masyarakat.

Kesenjangan akses pendidikan tersebut cenderung lebih nyata di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses geografis yang sulit, serta ketersediaan sumber daya pendidikan yang terbatas. Penelitian nasional menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas sekolah, distribusi guru yang tidak merata, dan jarak tempuh ke sekolah menjadi faktor utama yang menghambat keberlanjutan pendidikan di wilayah 3T (Patandung & Panggua, 2022) (Tutukansa et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan kajian internasional yang menegaskan bahwa wilayah terpencil di negara berkembang menghadapi hambatan sistemik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Tikly, Leon; Barrett, 2021). Dengan demikian, Gambar 1.2 memperkuat gambaran bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan struktural dan kewilayahan.

Gambar 1. 3 Diagram Batang Distribusi Daerah Tertinggal di Indonesia (2020-2024)

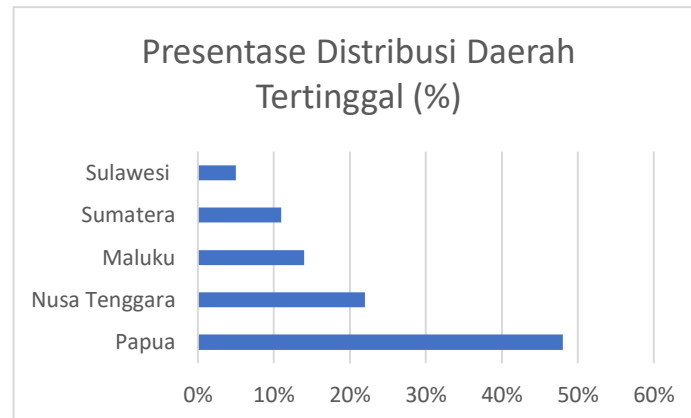


Diagram pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa distribusi daerah tertinggal di Indonesia masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia Timur. Pola ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan bersifat regional dan berkaitan erat dengan karakteristik geografis wilayah seperti keterisolasian, kondisi kepulauan, dan keterbatasan konektivitas. Kajian pembangunan regional menegaskan bahwa wilayah dengan hambatan geografis yang tinggi cenderung mengalami ketertinggalan pembangunan yang lebih persisten, termasuk dalam penyediaan layanan pendidikan (Asadullah, M. Niaz; Savoia, 2018)(Suryadarma, Daniel; Jones, 2021).

Konsentrasi daerah tertinggal di Indonesia Timur mencerminkan keterbatasan kapasitas pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kualitas dan keterjangkauan layanan publik. Penelitian nasional menunjukkan bahwa daerah tertinggal umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah, sehingga memperlebar kesenjangan akses pendidikan antarwilayah (Ardianti, Yulia; Rahman, Abdul; Putri, 2024)(Arizka, 2024). Kondisi ini

menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan di wilayah 3T tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari permasalahan pembangunan wilayah yang bersifat struktural.

Implikasi dari pola tersebut terlihat jelas pada sektor pendidikan, di mana wilayah tertinggal cenderung mengalami keterbatasan sumber daya pendidikan, baik dari sisi fasilitas sekolah maupun ketersediaan tenaga pendidik. Studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa wilayah terpencil di negara berkembang umumnya menghadapi defisit sumber daya pendidikan yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan keberlanjutan pendidikan (Syafii, 2018)(Tikly, Leon; Barrett, 2021). Oleh karena itu, Gambar 1.3 mempertegas bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia Timur tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan wilayah, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis kewilayahan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai kelompok usia yang semestinya dan menjadi indikator penting keterjangkauan pendidikan dasar dan menengah. Di wilayah 3T Indonesia Timur, APM sangat dipengaruhi oleh jarak ke sekolah, keterbatasan sarana pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta hambatan struktural seperti keterisolasian wilayah dan rendahnya dukungan transportasi, yang menyebabkan ketidaktepatan usia sekolah dan risiko ketertinggalan pendidikan sejak dini (Fikri, Muhammad; Nanda, 2022)(Arizka, 2024)(Asadullah, M. Niaz; Savoia, 2018)(Tikly, Leon; Barrett, 2021).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan capaian pendidikan penduduk sebagai hasil akumulasi pengalaman belajar dalam jangka panjang dan menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam mempertahankan partisipasi belajar lintas generasi. Di wilayah 3T Indonesia Timur, RLS umumnya mencerminkan keterbatasan kesempatan melanjutkan pendidikan akibat minimnya sekolah lanjutan, kondisi sosial ekonomi yang belum mendukung, serta ketimpangan historis pembangunan pendidikan, sehingga berbeda secara konseptual dari APM yang menilai akses pendidikan pada usia sekolah saat ini (Suryadarma, Daniel; Jones, 2021)(Yusuf, Ridwan; Astuti, 2023)(Hanushek, Eric A.; Woessmann, 2020a)(McCowan, 2018).

Indeks Sekolah merepresentasikan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan sebagai fondasi kelembagaan penyelenggaraan proses pembelajaran. Di wilayah 3T, keterbatasan infrastruktur sekolah seperti ruang kelas, fasilitas pendukung, dan lingkungan belajar yang layak menjadi hambatan utama peningkatan mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan, serta berdampak pada efektivitas pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik, sehingga membedakannya dari indikator partisipasi dan capaian pendidikan (Arsyad, Ilham; Mulyadi, 2021)(Ardianti, Yulia; Rahman, Abdul; Putri, 2024)(Tikly, Leon; Barrett, 2021).

Indeks Guru mencerminkan ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik sebagai faktor kunci kualitas layanan pendidikan. Di wilayah 3T Indonesia Timur, ketimpangan distribusi guru dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan insentif, serta rendahnya daya tarik wilayah bagi tenaga pendidik, yang berdampak pada rasio guru-siswa dan mutu pembelajaran, sehingga menjadikan Indeks Guru

sebagai indikator sumber daya manusia pendidikan yang berbeda dari infrastruktur sekolah maupun partisipasi siswa (Maulana, Rizky; Dewi, 2021)(Handayani et al., 2012) (Hanushek, Eric A.; Woessmann, 2020a).

Indeks Murid menunjukkan tingkat keterlibatan dan keberlanjutan partisipasi peserta didik dalam sistem pendidikan serta mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam mencegah putus sekolah. Di wilayah 3T, partisipasi siswa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga, aksesibilitas pendidikan, kualitas layanan sekolah, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga Indeks Murid menilai aspek keberlangsungan partisipasi pendidikan yang berbeda dari indikator akses usia sekolah maupun capaian pendidikan (Wijaya, 2021)(Rahman, 2023)(McCowan, 2018).

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan ekspektasi pendidikan generasi muda berdasarkan kondisi sistem pendidikan yang tersedia saat ini dan bersifat prospektif dalam menilai peluang pendidikan di masa depan. Di wilayah 3T Indonesia Timur, HLS sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sekolah, kualitas layanan pendidikan, serta dukungan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga menjadi indikator penting potensi pemerataan pendidikan antargenerasi yang berbeda secara konseptual dari RLS yang merefleksikan capaian pendidikan masa lalu (Hasanah & Putra, 2020; Widodo, 2021; Hanushek & Woessmann, 2020).

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan di wilayah 3T Indonesia Timur belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Ketimpangan akses dan capaian pendidikan yang masih terjadi mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam menjangkau wilayah dengan

hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan. Ketimpangan pendidikan di wilayah 3T bersifat sistemik karena dipengaruhi oleh faktor kewilayahan dan kapasitas pembangunan daerah yang terbatas (Suryadarma & Jones, 2021).

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai capaian normatif, melainkan harus diposisikan sebagai respons terhadap persoalan ketimpangan yang masih persisten. Tanpa pemahaman empiris yang kuat mengenai peran indikator partisipasi, capaian, dan input pendidikan, kebijakan berisiko bersifat parsial dan kurang tepat sasaran. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang menganalisis indikator-indikator pendidikan tersebut secara simultan dalam satu kerangka empiris, khususnya di wilayah 3T Indonesia Timur selama periode 2016–2024.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji ketimpangan pendidikan di Indonesia, sebagian besar studi masih menganalisis indikator pendidikan secara parsial, seperti hanya berfokus pada Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau Harapan Lama Sekolah (HLS) secara terpisah. Selain itu, kajian empiris yang mengintegrasikan indikator partisipasi, capaian pendidikan, dan input pendidikan (indeks sekolah, indeks guru, dan indeks murid) dalam satu kerangka analisis kuantitatif berbasis data panel masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis determinan pemerataan akses pendidikan secara simultan menggunakan pendekatan data panel, sehingga diharapkan mampu memberikan

gambaran empiris yang lebih komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan berbasis kewilayahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Sekolah–Guru–Murid, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap pemerataan akses pendidikan yang diproksikan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah 3T Indonesia Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Sekolah–Guru–Murid, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap pemerataan akses pendidikan (APM) di wilayah 3T Indonesia Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi wilayah provinsi-provinsi tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di kawasan Indonesia Timur, yaitu NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua, Maluku, Papua Barat, serta Maluku Utara. Penelitian dibatasi pada periode tahun 2016–2024 dengan menyesuaikan ketersediaan dan konsistensi data statistik pendidikan. Variabel yang dianalisis

mencakup indikator pemerataan akses pendidikan berupa Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta indikator pendukung yang meliputi indeks sekolah, indeks guru, dan indeks murid. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta sumber resmi dan relevan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan/atau ekonometrika sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dan program pendidikan, terutama untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini memberikan gambaran pemerataan pendidikan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya keadilan dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi langsung bagi praktik pendidikan dan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T, khususnya terkait peningkatan APM, RLS, HLS, serta pemerataan sekolah dan tenaga pendidik.

2. Implikasi Kebijakan Publik

Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini memberikan masukan penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan

berorientasi pada pemerataan. Hasil penelitian membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi wilayah dan kelompok yang memerlukan intervensi khusus, mendukung penerapan kebijakan afirmatif berbasis kebutuhan, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan nasional dalam mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

3. Bagi Pengembangan Wilayah

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wilayah dengan menegaskan hubungan antara ketimpangan pendidikan dan ketidakadilan wilayah. Hasilnya dapat menjadi dasar strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerataan akses pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, temuan ini mendukung perumusan kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan wilayah dan penerapan program afirmatif yang efektif, sehingga berkontribusi pada pemerataan pendidikan dan pembangunan nasional.